

**PENGARUH SPI DAN TEMUAN KETIDAK PATUHAN
TERHADAP OPINI AUDIT ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
SUMATERA UTARA TAHUN
2015-2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : M. AFWANDA TRINASYULI
NPM : 1505170513
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari SELASA, Tanggal 08 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : M. AFWANDA TRINASYULI
NPM : 1505170513
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH SPIDAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA TAHUN 2015-2017
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisum dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

PENGUJI II

(NOVIEN RIALDY, SE., M.Si)

Pembimbing

(WAN FACHRUDDIN, SE., M.Si, AK, CA, CPA)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : M. AFWANDA TRINASYULI
N.P.M : 1505170513
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH SPI DAN KETIDAK PATUHAN TERHADAP
OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA TAHUN
2015-2017

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

WAN FACHRUDDIN., SE., M.Si., AK., CA., CPA.,

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : M. AFWANDA TRINASYULI
N.P.M : 1505170513
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Penelitian : PENGARUH SPI DAN TEMUAN KETIDAK PATUHAN TERHADAP OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA TAHUN 2015-2017

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13/8/19	- Metode penulisan - Lampirkan data penelitian hasil spss. - Haris penulisan kesimpulan dengan hasil penelitian sebelumnya terdapat - Buatlah menu run data spss		
04/9/19	- Daftar isi dan pustaka Sampai dengan isi dan kotipannya - Kerapalan dan saran perbaikan sesuai dengan saran pembimbing		
01/9/19	Acc o mja hianu		

Medan, Oktober 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(WAN FACHRUDDIN SE, M.Si, AK, CA, CPA)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRAK

M. Afwanda Trinasyuli (1505170513) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2015-2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara \. Variabel penelitian ini terdiri dari Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan sebagai variabel bebas dan Opini Audit Atas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat. Dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*) dengan aplikasi program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative terhadap opini audit atas laporan keuangan sementara Temuan Ketidakpatuhan berpengaruh positif terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan.

Kata kunci : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Temuan Ketidakpatuhan, Opini Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2015-2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta nikmat yang tak terhingga baik nikmat kesehatan, keselamatan dan terutama nikmat waktu serta kesempatan ,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan keharibaan junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang dengan tuntunannya telah membawa manusia ke alam kebenaran yang penulis harapkan syafaatnya di hari akhir kelak, Amin.

Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Studi Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, maka penulis menyusun Skripsi ini dengan judul: **“Pengaruh SPI Dan Temuan Ketidak Patuhan Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2015-2017”**.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa saran maupun bimbingan. Melalui lembaran ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta M. Nasir dan Ibunda Yuliani dan Kedua kakak saya Resti Dian Nasyuli dan Tetra Dwi Nasyuli serta adik saya Leriansyah Putra Nasyuli yang telah memberikan segalanya kepada saya mulai dari kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Agussani, M,AP., selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara dan selaku dosen penasehat akademik.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi S-1 Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris Prodi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Wan Fachrudin, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam proses penyelesaian skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Karyawan dan Staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan
9. Semua teman seperjuangan di Program Studi S-1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Kurnia Sandi Sitorus, Syahri Ramadhan, Zulfahmi Ismail, Wendi Ramadhan, Mahatir Muhammad serta semua teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna dan masih banyak Kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan penulis skripsi ini.

Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis,

M. Afwanda Trinasyuli

1505170513

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Teori Keagenan	12
2. Opini Audit	15
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
4. Sistem Pengendalian Internal	19
5. Temuan Ketidapatuhan	22
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Defenisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel	30
1. Variabel Terikat	30
2. Variabel Bebas	30
F. Metode Analisis	33
1 Analisis Statistik Deskriptif	34
2 Pengujian Model	34
3 Pengujian Data	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 36
4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian	36
4.2 Statistik Deskriptif.....	36
4.3 Pengujian Hipotesis.....	37
4.3.1 Pengujian <i>-2 Log Likelihood</i>	38
4.3.2 Pengujian Nagelkerke <i>R Square</i>	39
4.3.3 Pengujian Hosmer and Lemeshow.....	40
4.3.4 Uji Multikolinierias.....	41
4.4 Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan.....	42
4.5 Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial	43
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Keterbatasan.....	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	27
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Sampel.....	37
Tabel 4.2	Pengujian -2 Log Likelihood.....	38
Tabel 4.3	Pengujian -2 Log Likelihood.....	39
Tabel 4.4	Pengujian Nagelkerke R <i>Square</i>	40
Tabel 4.5	Pengujian Hosmer and Lemeshow	41
Tabel 4.6	Uji Multikolinearis	41
Tabel 4.7	Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan	43
Tabel 4.8	Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial.....	44

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Opini Audit BPK di Sumatera Utara.....	6
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah harus dapat melakukan semaksimal mungkin dalam melaksanakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan terjamin akuntabilitasnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah, salah satunya adalah dengan menyusun tiga paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003, tiap pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, tiap kepala daerah juga diwajibkan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. PP No.71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah melalui Presiden juga mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai pasal

58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, harus dilakukan pemeriksaan terhadap pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinilai oleh auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh BPK melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. (Kurniawan, 2009) menyatakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah monopoli, diskresi dan akuntabilitas. Klitgaard mengembangkan definisi korupsi melalui formulanya yang sangat terkenal yaitu $C = M + D - A$.

C = Corruption/ Korupsi

M = Monopoly/ Monopoli

D = Discretion/ Diskresi / keleluasaan

A = Accountability/ Akuntabilitas

Karena pada dasarnya tindakan korupsi bukan saja terjadi di sector pemerintahan tetapi juga dalam dunia bisnis dan bahkan dalam masyarakat. Namun demikian,

suatu tindakan dapat dikategorikan korupsi siapapun pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur : $C=M+D-A$.

1. Suatu penghinaan terhadap kepercayaan.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat Umumnya.
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan dimana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain.
7. Terputusnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum.
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Dimana menurut Klitgaard yang dimaksud dengan korupsi adalah adanya monopoli kekuasaan terhadap barang atau jasa ditambah dengan adanya kekuasaan untuk melakukan diskresi mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas.

Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah. Semakin baik

akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan) maka korupsi yang terjadi di pemerintah daerah semakin berkurang. (Kurniawan, 2009)

Sistem pengendalian merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengendalian intern merupakan elemen penting dalam penilaian laporan keuangan Pemerintah Daerah (Hafsah, 2009). Sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah hal yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas roda organisasi. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan (Maya, 2015)

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini dan laporan hasil pemeriksaan atas SPI di lingkungan entitas pemeriksaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, opini yang dapat diberikan oleh auditor yakni Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.

Tujuan dari dilakukannya audit yang berkesinambungan sejalan dengan penerbitan laporan keuangan oleh BPK adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel. Tercapainya tujuan BPK tersebut tercermin melalui opini pemeriksaan yang dihasilkan. Opini yang semakin baik di tiap tahunnya adalah hasil yang diharapkan dalam tiap kelangsungan kinerja pemerintah daerah.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, berbagai bentuk kerugian tersebut diklasifikasikan menjadi enam macam temuan yaitu temuan

kerugian negara, temuan potensi kerugian, temuan kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan ketidakefektifan, dan temuan pemborosan. Komponen yang juga diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Suatu laporan keuangan dapat dinilai tidak wajar karena adanya salah saji material yang disebabkan dari tindakan/kegiatan yang melanggar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007).Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui akan menjadi tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan. Apabila auditor menemukan pengaruh tindakan ketidakpatuhan tersebut bersifat material dan tidak memadai dalam pengungkapannya maka auditor harus memodifikasi audit sesuai dengan hal tersebut.

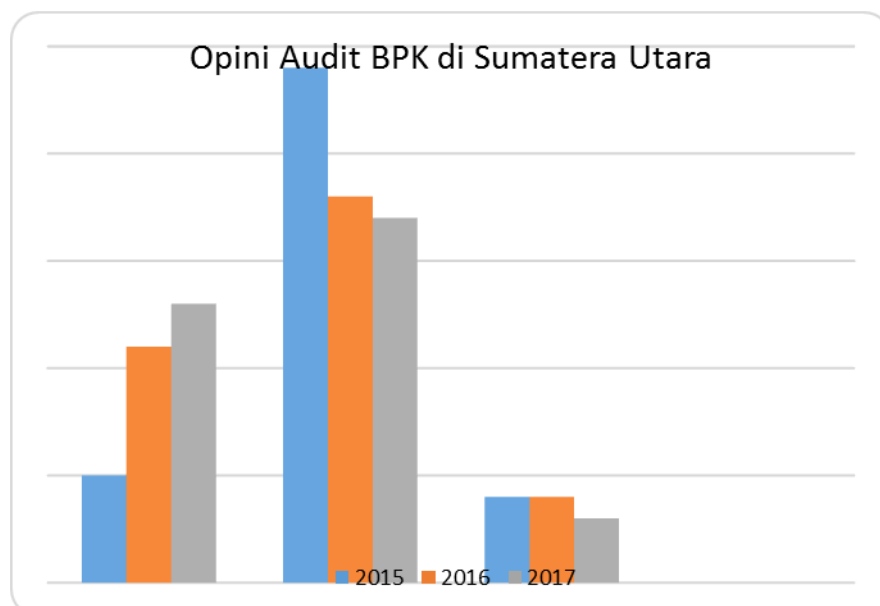
Kemudian dari perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah lainnya yang perlu dicermati dari Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 BPK RI, atas perolehan opini dari tahun 2007 s.d. 2011 adalah perolehan opini WTP tidak hanya untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk namun juga bagi pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah.

Padahal untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk, tentunya dinilai lebih dulu memiliki kemampuan dalam hal dukungan teknis dan fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan

publik (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007) bila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah.

Dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2017) BPK telah melakukan pemeriksaan di Sumatera Utara sebanyak 99 objek pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, terdapat total 32 opini WTP, 59 Opini WDP, 11 Opini TMP dan tidak ada Opini Tidak Wajar.

Gambar 1.1 Opini Audit BPK di Sumatera Utara dari Tahun 2015-2017



Sumber: IHPS Semester I Tahun 2018 BPK

Grafik diatas merupakan Opini Audit Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2015-2017. Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa opini WTP, WDP, TMP dan TW mengalami peningkatan dan juga penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 Opini WTP diberikan oleh BPK kepada Kabupaten Dairi, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Opini WTP diberikan BPK karena LKPD yang diperiksa oleh BPK dinilai telah disajikan dengan Wajar atau Bebas dari salah saji

material, Namun pada tahun 2014 Opini WTP yang diberikan oleh BPK mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 Opini WTP yang diberikan oleh BPK mengalami penurunan. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi penurunan dan peningkatan. Untuk itulah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan Opini Audit atas Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh BPK di wilayah Sumatera Utara. Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini audit hanya ditemukan dalam penelitian untuk perusahaan atau sektor privat.

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini, BPK juga harus mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan SPI dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern.

Kelemahan SPI pada sebuah entitas dapat meningkatkan risiko pengendalian, yakni risiko kecurangan (*fraud*), penggelapan, serta tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah. Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22), mendefinisikan kerugian negara sebagai, “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Penelitian yang dilakukan oleh (Munawar, 2016) membuktikan bahwa kelemahan SPI tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit atas LKPD diterima. Ini berarti bahwa adanya kelemahan SPI yang sedang dihadapi oleh pegawai di pemerintah daerah auditor akan berdampak negatif terhadap opini audit atas LKPD yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat kelemahan SPI yang diemban tidak ada hubungannya dengan opini audit atas LKPD yang dihasilkan

Menurut (Januri, 2018) pengendalian internal adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi serta memberikan keyakinan yang memadai.

Menurut (Astuty, 2016) pengendalian intern adalah suatu proses yang ada pada aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pada dasarnya kelemahan SPI merupakan tingkat pengendalian internal yang sudah tersistem yang diemban oleh seorang pegawai pemerintah daerah. Tingkat kelemahan SPI tersebut tergantung dari apakah suatu pengendalian tersebut sudah cocok dengan hasil *output* yang dihasilkan dan tidak adanya penyelewengan atau kesalahan yang disengaja selama *control* tersebut berjalan. Dalam Penelitian (Yuhridza, 2018), Kelemahan SPI dan mempengaruhi opini audit atas LKPD. Sedangkan (Sembiring, 2016), Kelemahan SPI, dan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh (oka Purnawan, 2017) membuktikan bahwa temuan ketidakpatuhan berpengaruh negatif terhadap opini audit atas LKPD diterima. Sedangkan (Yuhridza, 2018) bahwa temuan ketidakpatuhan

berpengaruh terhadap opini audit LKPD. Ini berarti bahwa adanya temuan ketidakpatuhan yang sedang dihadapi oleh pegawai di pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat temuan ketidakpatuhan semakin rendah opini audit atas LKPD yang dihasilkan.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Pada dasarnya temuan ketidakpatuhan merupakan tingkat penilaian apakah seluruh perangkat pemerintah daerah sudah taat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Tingkat ketidakpatuhan tersebut tergantung dari seberapa banyak temuan dan bukti terkait perangkat pemerintah daerah yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian (Sembiring, 2016), temuan ketidakpatuhan merupakan variabel yang mempengaruhi opini audit atas LKPD.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu adanya ketidak konsistenan terhadap peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian (Yuhridza, 2018), Kelemahan SPI dan Temuan Ketidakpatuhan, berpengaruh signifikan terhadap

Opini Audit atas LKPD. Sedangkan menurut (oka Purnawan, 2017), Kelemahan SPI dan Temuan Ketidapatuhan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit atas LKPD. Belum diketahui secara pasti faktor-faktor yang secara konsisten mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mengingat akan pentingnya hasil opini audit yang dikeluarkan BPK atas LKPD maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2015-2017”.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidak konsistenan hasil penelitian pada peneliti sebelumnya.
2. Hasil dari opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yang masih belum maksimal pada tahun 2015 sampai 2017

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh SPI terhadap Opini Audit?
2. Apakah ada pengaruh Temuan Ketidak Patuhan terhadap Opini Audit?
3. Apakah kelemahan SPI dan temuan ketidakpatuhan, secara simultan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kelemahan SPI dan temuan ketidakpatuhan, secara parsial dan simultan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan akademis, yaitu:

1. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian membuktikan secara empiris pengaruh Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

2. Akademis dan peneliti selanjutnya

Di harapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan pustaka di perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai kajian literatur pada peneliti selanjutnya yang sejenis.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Di harapkan hasil penelitian dapat membantu upaya dalam meningkatkan pengaruh Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Khususnya di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang melandasi penelitian ini. Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) yang mengungkapkan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* yang bersangkutan. Dalam prakteknya manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui lebih banyak informasi kondisi internal dan keberlangsungan prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan investor. Sehingga sebagai pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi dalam perusahaan

Menurut Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) teori agensi ini menyatakan bahwa adanya pemisah antara *principal* dan agen yang akan menimbulkan permasalahan *agency* karena pihak-pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya masing-masing. Dapat disimpulkan teori ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak *principal* dan agen memiliki kepentingan mereka sendiri dalam menjalankan praktik bisnisnya. Dengan gambaran pihak *principal* mementingkan hasil keuangan perusahaan atas dasar pengembalian uang investasi di dalam perusahaan, sedangkan pihak *agency*

mementingkan timbal balik seperti kompensasi atau gaji yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan

Sejak tahun 2001, Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi yang berarti ada penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Pemda. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Pemda diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik dari segi administratif pemerintahan maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada bulan Oktober tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan

basis akrual sebagai pengganti PP No. 24 tahun 2005. Namun, PP No. 71 tahun 2010 baru diterapkan paling lambat untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. PP No. 71 Tahun 2010 tidak hanya menerapkan basis akrual saja tetapi juga masih mengakomodir penerapan berbasis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005. Untuk menyempurnakan SAP, pemerintah juga mengeluarkan buletin teknis SAP. Buletin teknis SAP dimaksudkan Dyah Setyaningrum, untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dan memberikan informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna yang diatur dalam Buletin Teknis No. 3. Sebagai bentuk pengawasan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (1) adalah pengungkapan yang cukup, dimana laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang wajib disajikan berdasarkan SAP. Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah dalam CaLK adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan

2. Opini Audit

Sesuai pasal 58 ayat (1) Tahun 2004, yang di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dan undang-undang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004), UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai Peraturan Pemerintah, dan Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah pada tahun dilakukannya pemeriksaan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yaitu:

- a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- d) efektivitas system pengendalian intern (SPI).

Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dengan adanya kewajaran informasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*), Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Opini Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Laporan Keuangan SKPD terdiri atas tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk menjamin

tercapainya akuntabilitas, laporan keuangan SKPD yang disampaikan dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD. Surat pernyataan kepala SKPD berisi pernyataan bahwa laporan keuangan SKPD menjadi tanggung jawabnya dan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD. LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. LKPD disusun dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah

daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Setiawan, 2012).

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat 2 disebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi Laporan Keuangan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

4. Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Hery, 2015), Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik.

Berdasarkan pengertian pengendalian internal diatas, kita dapat memahami bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (*fraude*) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pengendalian Internal yang baik memiliki karakteristik yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Suatu rencana organisasi yang memungkinkan adanya pemisahan pertanggungjawaban fungsi secara tepat.
2. Suatu sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat untuk memungkinkan *accounting control* yang memadai terhadap aktiva, hutang, pendapatan dan biaya.
3. Praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi kualitas pengamat yang cocok dengan tanggungjawabnya.

Karakteristik yang baik akan mendukung terciptanya pengendalian internal yang efektif. Rencana organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang sehat serta kualitas pengamat yang cocok harus terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Kelancaran pekerjaan akan memudahkan pengendalian internal terlaksana dalam mencapai tujuan

Menurut (Mulyadi, 2014), terdapat 5 keterbatasan atas pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.
2. Gangguan-gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.
3. Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen, manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.
5. Biaya lawan, manfaat biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan

secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.

5. Temuan Ketidakpatuhan

Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Di dalam SPKN dicantumkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus mengungkapkan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan telah dijalankan oleh pemeriksa.

SAP merupakan acuan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengguna laporan keuangan menggunakan SAP untuk dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan auditor eksternal menggunakan SAP sebagai kriteria dalam melaksanakan audit.

SAP yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi landasan bagi semua entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selain SAP, BPK menggunakan kriteria lainnya dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan antara lain tiga paket undang-undang keuangan Negara

(UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004), UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai Peraturan Pemerintah, dan Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah pada tahun dilakukannya pemeriksaan.

Sejak tanggal 1 Januari 2007, Ketua BPK mengeluarkan suatu standar yang disebut dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah, tidak hanya mengacu pada Standar Audit Pemerintahan tahun 1995. Standar Pemeriksaan nomor 3 terkait dengan standar pelaporan pemeriksaan keuangan, mengharuskan auditor membuat suatu laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAP) atau prinsip akuntansi yang berlaku umum secara komprehensif.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Berdasarkan SPKN, temuan kepatuhan mengungkapkan antara lain:

1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana.

2. Ketidakpatuhan yang signifikan.

Sama halnya seperti LHP SPI, LHP atas kepatuhan diterbitkan jika ditemukan ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan (BPK RI 2014).

B. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai opini atas LKPD telah banyak dilakukan. Penelitian (Yuhridza, 2018) menyimpulkan bahwa kelemahan SPI berpengaruh positif terhadap opini atas LKPD karena diduga semakin tinggi kelemahan SPI maka opini atas LKPD semakin baik.

Penelitian (Safitri, 2015), menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan berpengaruh terhadap opini atas LKPD karena jika ditemukannya ketidakpatuhan dapat mengakibatkan opini atas LKPD semakin meningkat..

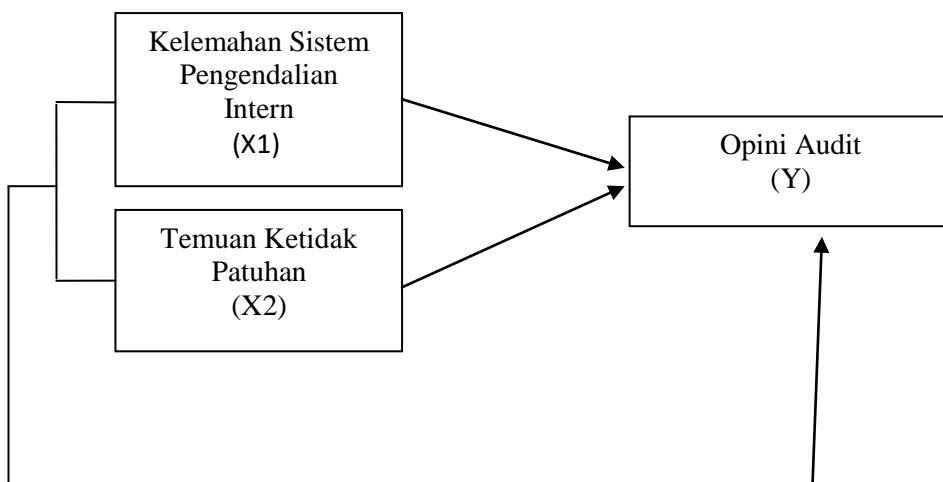
Secara ringkas, penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi opini atas LKPD disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
(Yuhridza, 2018)	Variabel Independen: Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan, dan Umur Pemerintahan Variabel Dependen : Opini Audit atas LKPD	Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan, dan Umur Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD
(Sembiring, 2016)	Variabel Independen : Kelemahan SPI dan Temuan Ketidapatuhan. Variabel Dependen : Opini Audit atas LKPD	Kelemahan SPI, dan Temuan Ketidapatuhan, berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD
(Priyonggo, 2016)	Variabel Independen : Dukungan Manajemen Puncak, Kelemahan SPI dan Temuan Ketidapatuhan. Variabel Dependen : Opini Audit atas LKPD	Dukungan Manajemen Puncak, Kelemahan SPI, dan Temuan Ketidapatuhan, berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD

C. Kerangka Konseptual

Salah satu kewajiban auditor BPK adalah memberikan opini atas tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam mengambil keputusan mengenai penetapan opini, tim auditor menggunakan berbagai pertimbangan baik yang berasal dari laporan keuangan, termasuk pendapat terhadap efektivitas pengendalian internnya, kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, maupun kecukupan pengungkapan di dalamnya. Faktor lainnya terkait dengan realisasi anggaran yang secara tidak langsung berkaitan dengan level pengendalian internal, serta adanya asumsi bahwa opini audit tahun sebelumnya. Hal tersebut kemudian membentuk sebuah kerangka konseptual dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Pengaruh SPI dan Temuan Ketidak Patuhan
Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Sumater Utara Tahun 2015-2017

D. Hipotesis

1. SPI berpengaruh terhadap Opini Audit
2. Temuan Ketidak Patuhan berpengaruh terhadap Opini Audit
3. Kelemahan SPI dan temuan ketidakpatuhan, secara simultan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal (*causal*). Menurut (Sugiyono, 2012) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan/Minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■	■	■	■								
4	Pengumpulan Data													■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
6	Sidang																			■	■

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari berbagai macam sumber seperti dari *internet*, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks, dan dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dimulai dari proses penentuan judul penelitian pada bulan Juni 2017 hingga penelitian ini selesai dilakukan. Adapun jadwal penelitian digambarkan dalam tabel 3.1 diatas

C. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Sumatera Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota yang ada. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang melampirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015-2017. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh, sehingga semua populasi dijadikan sampel pada penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan, catatan, dokumentasi, *website*/situs resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2017. Sumber data selanjutnya adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II yang diperoleh peneliti dari situs BPK www.bpk.go.id

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

1 Variabel Terikat

Menurut (Siregar, 2013), “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel independen/bebas)”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini audit atas laporan keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan audit. Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Variabel dijadikan dua kategori yaitu kategori *unqualified* dan *non unqualified*. Kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) diberi nilai *dummy* 1, selain dari itu diberi nilai *dummy* 0.

2. Variabel Bebas

Menurut (Siregar, 2013), “Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau mengubah/mempengaruhi variabel lain (variabel terikat)”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan

a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Variabel kelemahan sistem pengendalian intern LKPD diukur dengan menghitung jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern atas LKPD yang dilaporkan BPK.

b. Temuan Ketidakpatuhan

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Variabel ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan LKPD diukur dengan menghitung jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD yang dilaporkan BPK.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran	Skala
Variabel Independen				
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X ₁)	Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.	Besarnya tingkat kelemahan sistem pengendalian intern dilihat dari jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern atas LKPD yang dilaporkan BPK. Sebagai berikut: Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan, dan belanja, kelemahan struktur pengendalian intern, memberikan sanksi administrative kepada pejabat/staf yang belum cermat, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, menyusun roodmap/renstra, membentuk tim verifikasi dan validasi, lebih cermat dalam mengusulkan alokasi, menyusun kebijakan/ SOP untuk suatu prosedur.	Nominal

Lanjutan Tabel 3.2				
No	Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran	Skala
2	Temuan Ketidak Patuhan (X ₂)	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.	Besarnya jumlah temuan kepatuhan dilihat dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas LKPD yang dilaporkan BPK Sebagai berikut: Kas, Aset lancar selain kas, investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, kewajiban, pendapatan LRA, belanja, belanja barang, belanja modal, belanja daerah lainnya, beban LO, pendapatan LO, pengecualian lainnya.	Nominal
Variabel Dependen				
3	Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Y)	Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ <i>unqualified opinion</i>), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ <i>Qualified opinion</i>), Tidak Wajar (TW/ <i>Adverse opinion</i>) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/ <i>Disclaimer opinion</i>).	Kategori <i>unqualified</i> yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ <i>unqualified opinion</i>) diberi nilai <i>dummy</i> 1, selain dari itu diberi nilai <i>dummy</i> 0.	Dummy

F. Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik yang memberi informasi mengenai data yang diteliti dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik sendiri terdiri dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi.

2. Pengujian Model

2.a. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Fit Model*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (*overall*) di dalam model. Pengujian *overall fit* model menggunakan uji *Likelihood Ratio*. Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1 = \beta_2$, tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen,
atau model tidak fit.

$H_1 = \beta_1 \neq \beta_2$, ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogLikelihood atau $-2LL$. Penurunan *Likelihood* ($-2LL$) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data (Ghozali).

2.b. Menguji Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lomeshow's Goodness of Fit Test*)

Pengujian kelayakan model regresi menggunakan uji *Hosmer and Lomeshow's Goodness Fit Test*. Uji ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara model data sehingga model dikatakan fit. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit model* tidak fit. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Gozhali, 2006).

2.c Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Nagelkerke R Square dan *Cox and Snell R Square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari *Cox and Snell R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol sampai satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien *Nagelkerke R Square* sama dengan nilai R^2 pada regresi linear berganda (Gozhali, 2006).

3. Pengujian Data

Regresi logistik yaitu regresi yang digunakan sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel

independen. Pengujian data pada analisis regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik terkecuali uji multikolinearitas.

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabelindependen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikoliniearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat toleransi variabel dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan syarat sebagai berikut:

- a. Bila $VIF > 10$ terdapat masalah multikolinearitas.
- b. Bila $VIF < 10$ tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- c. $Tolerance < 0,1$ maka diduga mempunyai persoalan multikolinearitas.
- d. $Tolerance > 0,1$ maka tidak terdapat multikolinearitas.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien regresi logistik. Koefisien regresi dari setiap variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan variabel. Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Opini Audit atas LKPD

α = konstanta

X_1 = Kelemahan SPI

X_2 = Temuan Ketidakpatuhan

ε = error

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota. Berdasarkan populasi tersebut didapatkan sampel sebanyak 33×3 tahun = 99 unit observasi.

4.2 Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai variabel penelitian (Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan, Opini Audit Atas Laporan Keuangan) yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi untuk setiap variabel yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Sampel
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kelemahan sistem pengendalian intern	99	0	5	2.21	4.855
temuan ketidakpatuhan	99	0	7	3.26	8.011
opini audit atas laporan keuangan	99	1	5	4.83	7.742
Valid N (<i>listwise</i>)	99				

Sumber data : SPSS, peneliti 2019

Berdasarkan pengujian deskriptif tersebut dengan jumlah sampel sebesar 99, maka pada variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern diperoleh nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 2.21, dan nilai standar deviasi sebesar 4.855. Variabel Temuan Ketidak patuhan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 7, nilai rata-rata sebesar 3.26, dan nilai standar deviasi sebesar 8.011. Pada variabel opini audit atas laporan pemerintah diperoleh nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 4.83, dan nilai standar deviasi sebesar 7.742.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah untuk menganalisis pengaruh dari Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Setelah pengujian statistik deskriptif berikutnya akan dilakukan pengujian regresi logistik untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan terhadap Opini Audit

Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta membentuk model regresi logistik karena variabel terikatnya memiliki dua nilai (0 dan 1), maka digunakan model *Regression Logistic* (Gozhali, 2011). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik yang dilakukan secara bersama-sama untuk ketiga variabel dengan tingkat signifikansi 5%. Perbandingan nilai aktual dan prediksi bisa dicapai dengan menggunakan beberapa pengukuran untuk mengukur kelayakan regresi, yaitu: (1) dengan melihat *-2 Log Likelihood*, (2) koefisien determinasi (*Cox & Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*), (3) menilai *chi-square* untuk keseluruhan model (*Hosmer and Lemeshow Test*).

4.3.1 Pengujian -2 Log Likelihood

Pengujian regresi logistik yang pertama adalah dengan menggunakan uji - 2 log likelihood. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi logistik yang digunakan telah layak atau tidak. Hasil pengolahan data SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Pengujian -2 Log Likelihood Step 0
Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 0 1	125.637	.131
2	125.637	.132

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 136.748

c. Estimation terminated at iteration number 2 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : SPSS, Peneliti 2019

Tabel 4.3
Pengujian -2 Log Likelihood Step 1

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	116.835 ^a	.136	.303

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : SPSS, Peneliti 2019

Pada tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan nilai dari hasil pengujian *-2 log likelihood* yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap pertama (step 0) dan tahap kedua (step 1). Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat nilai *-2 log likelihood* step 0 adalah sebesar 125.637 sedangkan pada step 1 yang terdapat pada tabel 4.3 nilai *-2 log likelihood* sebesar 116.835. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan pada nilai *-2 log likelihood*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi logistik yang digunakan layak dan penambahan variabel bebas kedalam model memperbaiki model fit.

4.3.2 Pengujian Nagelkerke R Square

Setelah pengujian *-2 log likelihood* selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pengujian Nagelkerke R Square. Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besarkah variasi dari variabel terikat (Opini Audit Atas Laporan Keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang diteliti (Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan). Hasil pengujian Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Pengujian Nagelkerke R Square
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	116.835 ^a	.136	.303

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : SPSS, Peneliti 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai Nagelkerke R *Square* adalah sebesar 0.303. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel terikat (Opini Audit Atas Laporan Keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan) sebesar 30.3%.

4.3.3 Pengujian Hosmer and Lemeshow

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah pengujian Hosmer and Lemeshow. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis 0 bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak terdapat perbedaan model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai pengujian Hosmer and Lemeshow *test* sama dengan atau kurang dari 0.05 maka hipotesis 0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sebaliknya, jika nilai pengujian Hosmer and Lemeshow lebih besar dari 0.05 maka model dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan nilai observasinya sehingga hipotesis 0 diterima. Berikut adalah hasil pengujian Hosmer and Lemeshow:

Tabel 4.5
Pengujian Hosmer and Lemeshow
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
------	------------	----	------

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.167	8	.832

Sumber : SPSS, peneliti 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan nilai signifikansi statistik Hosmer and Lemeshow *Goodness of Fit Test* sebesar 0.832 yang nilainya lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat diterima karena mampu memprediksi nilai observasinya atau sesuai dengan data observasinya.

4.3.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas (bebas dari multikolinearitas). Multikolinearitas ini dapat dilihat dari VIF (*Variances Inflation Factor*). Jika VIF 10 maka tingkat multikolinearitas dapat ditoleransi. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari TOL (*Tolerance*) jika $TOL > 10\%$ (0,10) maka multikolinearitas dapat ditoleransi, artinya data yang bebas dari multikolinearitas ialah yang nilai $VIF < 10$ dan $TOL > 10$.

Tabel 4.6

Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistics		kelemahan sistem internal memiliki
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kelemahan SPI	.541	3.436	
Temuan KP	.677	2.613	

pengendalian

nilai tolerance 0,541 dan VIF 3.436 maka dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Variabel temuan ketidakpatuhan memiliki nilai tolerance 0,677 dan VIF 2.613 maka dinyatakan bebas dari multikolinearitas

4.4 Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan

Pengujian regresi logistik secara simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan) secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu (Opini Audit Atas Laporan Keuangan). Pengujian regresi logistik secara bersama-sama atau simultan disebut dengan *Omnibus Test of Model Coefficient*. Dalam pengujian ini semua variabel bebas yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidak patuhan di uji secara bersama-sama. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu opini audit. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0.05 maka hipotesis ditolak sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0.05 maka hipotesis diterima. Hasil pengujian regresi logistik secara simultan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan
Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	Df	Sig.
Step 1 Step	7.613	3	.041
Block	7.613	3	.041
Model	7.613	3	.041

Sumber : SPSS, peneliti 2019

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0.041. Nilai tersebut < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan pada Kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

4.5 Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial

Langkah selanjutnya adalah menguji regresi logistik secara parsial atau menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan melihat tabel *variables in the equation*. Pengujian hipotesis regresi logistik dilakukan dengan memasukkan seluruh variabel bebas (Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan) dan juga variabel terikat (Opini Atas Laporan Keuangan).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode enter dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi > 0.05 maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak. Hasil pengujian regresi logistik secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial

Wald Test

	B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a X1	-.238	.095	1.777	1	.183
X2	.259	.071	4.347	1	.037
Constant	.231	.288	.201	1	.454

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.

Sumber : SPSS, peneliti 2019

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik tersebut maka dapat diketahui persamaan logistik linear sebagai berikut:

$$Y = 0.231 - 0.238X_1 + 0.259X_2$$

Dimana:

Y = Opini atas laporan keuangan

X₁ = Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

X₂ = Temuan Ketidak patuhan

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik pada tabel 4.8 diatas, hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Temuan Ketidak patuhan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui dimana variabel bebas yang pertama yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Opini atas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.183 (>0.05). Artinya, semakin rendah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka opini yang diberikan oleh BPK akan semakin baik. Opini BPK yang baik menggambarkan bahwa efektivitas sistem pengendalian

intern pada pemerintah daerah sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, dan M. Rasuli (2014), bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap Opini WTP. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Opini atas laporan keuangan, sehingga hipotesis ditolak.

2. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui dimana variabel bebas yang kedua yaitu temuan ketidak patuhan (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.037 (<0.05). Artinya, semakin sedikit ditemukan jumlah temuan atas ketidakpatuhan maka akan semakin memperbesar probabilitas diberikannya opini WTP oleh BPK. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Luh Ketut Shanti & Darsono, 2015), bahwa temuan ketidakpatuhan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap opini audit yang artinya semakin banyak ditemukan jumlah temuan atas ketidakpatuhan maka akan semakin memperkecil probabilitas diberikannya opini WTP oleh BPK. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan temuan ketidak patuhan berpengaruh positif signifikan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan, sehingga hipotesis diterima.
3. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui dimana variabel bebas yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap opini audit atas laporan keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.454 (<0.05). Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Ni Luh Ketut Shanti & Darsono, 2015), bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit atas laporan keuangan. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidak patuhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan, sehingga hipotesis diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Temuan Ketidakpatuhan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara simultan dan parsial. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara simultan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan berpengaruh terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
2. Secara parsial Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3. Secara parsial Temuan Ketidakpatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

5.2 Saran

1. Para peneliti selanjutnya

Para peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian sehingga dapat lebih meningkatkan generalisasi hasil penelitian, dan diharapkan dapat menggunakan variabel pemoderasi untuk variasi penelitian selanjutnya.

2. Badan Pengawas Keuangan (BPK)

Badan Pengawas Keuangan sebagai pihak regulator diharapkan lebih memperhatikan serta meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari segi sistem pengendalian internal dan tingkat ketidakpatuhan demi opini audit yang lebih bagus lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal dan Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. *International Conference On Accounting And Finance, 1 (8)*, 1–21. Yogyakarta.
- Gozhali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Gozhali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.
- Hafsah. (2009). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU, 1(1)*.
- Hery. (2015). *Akuntansi dasar*.
- Januri. (2018). Analisis Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Madya Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU, 2(3)*.
- Kurniawan, T. (2009). peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan, bisnis & birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 16(2)*.
- Maya, S. (2015). Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 5(5)*.
- Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi. In *Salemba Empat* (p. 181).
- Munawar. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atau SPI Dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 5(2)*.
- Ni Luh Ketut Shanti, A. S., & Darsono. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal of Accounting, 4(1)*.
- oka Purnawan, W. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal of Accounting, 6(1)*.
- Priyonggo. (2016). Dukungan Manajemen Puncak, Kelemahan SPI dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Opini Audit atas LKPD. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 5(1)*.
- Safitri. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah. Semarang. *Jurnal of*

Accounting, 5(1), 1–12.

Sembiring, A. T. (2016). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.

Setiawan, W. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia.* , (2012).

Siregar, I. S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan SPSS. In *Kencna, Jakarta* (p. 10).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*.

Yuhridza. (2018). *Pengaruh Kelemahan SPI dan Temuan Kepatuhan dan Umur Pemerintah Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. AFWANDA TRINASYULI
NPM : 1505170513
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 04 Oktober 2019
Saya yang menyatakan



M. AFWANDA TRINASYULI